

TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA HUKUM TERHADAP SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Level Of Law Students' Understanding Of The Sources Of Criminal Procedure Law In Indonesia

Fitriliana¹, Lisnawati², Murnia Suri³, Kesumawati⁴, M. Hafiz⁵

Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia

Korespondensi Penulis: fitriliana@uui.ac.id

Abstrak

Sumber-sumber hukum acara pidana memegang peranan penting dalam membentuk kerangka hukum yang mengatur proses peradilan pidana di Indonesia ataupun sumber-sumber hukum acara pidana merupakan fondasi penting bagi mahasiswa hukum dalam memahami sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa hukum terhadap berbagai sumber hukum acara pidana, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), peraturan pelaksana, yurisprudensi, dan doktrin. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan instrumen kuesioner yang disebarakan kepada mahasiswa dari berbagai jenjang semester. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP dipahami secara umum oleh mayoritas responden, pemahaman terhadap sumber hukum lainnya masih tergolong rendah. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam literasi hukum yang perlu ditanggapi melalui metode pembelajaran yang lebih menyeluruh, kontekstual, dan berbasis pengalaman langsung. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik seperti *moot court*, klinik hukum, dan forum diskusi terbimbing terbukti berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman tersebut. Dengan demikian, pengembangan metode pengajaran hukum acara pidana yang lebih aktif dan aplikatif menjadi sangat penting agar mahasiswa tidak hanya memahami teori secara tekstual, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik hukum yang sesungguhnya.

Kata Kunci: Tingkat Pemahaman, Mahasiswa Hukum, Hukum Acara Pidana

Abstract

Sources of criminal procedure law play an important role in forming the legal framework that regulates the criminal justice process in Indonesia or sources of criminal procedure law are an important foundation for law students in understanding the criminal justice system in Indonesia. This study aims to measure the level of understanding of law students regarding various sources of criminal procedure law, including the Criminal Procedure Code (KUHP), implementing regulations, jurisprudence, and doctrine. The method used is a descriptive quantitative approach with a questionnaire instrument distributed to students from various semester levels. The results of the study indicate that although the Criminal Procedure Code is generally understood by the majority of respondents, understanding of other sources of law is still relatively low. This condition reflects a gap in legal literacy that needs to be addressed through more comprehensive, contextual, and experience-based learning methods. Student participation in academic activities such as moot courts, legal clinics, and guided discussion forums has been shown to have a positive impact on increasing this understanding. Thus, the development of a more active and applicable method of teaching criminal procedure law is very important so that students not only understand the theory textually, but are also able to apply it in real legal practice.

Keywords: Level of Understanding, Law Students, Criminal Procedure Law

PENDAHULUAN

Hukum acara pidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Melalui hukum acara pidana, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana diatur secara sistematis, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan. Keberadaan hukum acara pidana tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi bagi setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum acara pidana, termasuk seluruh sumber hukumnya, menjadi sangat penting bagi mahasiswa Prodi hukum. Tidak hanya sebagai bentuk penguasaan materi perkuliahan, tetapi juga sebagai bekal dalam menjalankan peran profesional yang menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Sumber-sumber hukum acara pidana, seperti KUHAP, peraturan pelaksana, yurisprudensi, dan doktrin, harus dipahami secara menyeluruh agar mahasiswa hukum mampu menganalisis dan menerapkan norma-norma hukum secara tepat dalam berbagai konteks hukum pidana.

Kenyataannya, tingkat pemahaman mahasiswa hukum terhadap berbagai sumber hukum acara pidana masih sangat bervariasi. Banyak di antaranya yang masih terbatas pada penguasaan teks KUHAP secara formal, tanpa diimbangi dengan pemahaman yang mendalam terhadap peran yurisprudensi, peraturan pelaksana, maupun doktrin sebagai bagian dari sumber hukum yang bersifat dinamis dan aplikatif. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi hukum, karena pemahaman yang parsial dapat berdampak pada lemahnya kemampuan analisis hukum dan penerapannya dalam konteks kasus nyata. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih integratif dan aplikatif, yang tidak hanya menekankan pada aspek teoritis, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk mengaitkan materi yang dipelajari dengan praktik hukum di lapangan secara kritis dan kontekstual. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan kebutuhan kompetensi yang diperlukan

dalam praktik hukum. Jika tidak segera diatasi, ketimpangan ini dapat menghambat proses pembentukan lulusan hukum yang mampu berpikir kritis, responsif terhadap perkembangan hukum, serta siap menghadapi kompleksitas dunia peradilan pidana yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan evaluasi terhadap tingkat pemahaman mahasiswa hukum terhadap seluruh sumber hukum acara pidana, agar dapat dirumuskan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan tuntutan profesi hukum di masa depan.

Melalui evaluasi, institusi pendidikan hukum diharapkan dapat memperoleh gambaran yang objektif mengenai sejauh mana mahasiswa memahami berbagai sumber hukum acara pidana, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperkuat dalam proses pembelajaran. Hasil dari evaluasi ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan kegiatan akademik berbasis praktik yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, sehingga menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan dalam dunia profesi hukum secara nyata.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa program studi hukum terhadap berbagai sumber hukum acara pidana di Indonesia?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa hukum terhadap sumber-sumber hukum acara pidana?

METODELOGI

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Universitas Ubudiyah Inonesia pada tahun 2024 mulai dari bulan November hingga bulan Maret 2025.

Dalam Penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian antara lain.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini digolongkan kepada Field Research (Penelitian Lapangan) dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi untuk mencari data yang diperlukan. Untuk memperkuat analisis lapangan peneliti juga menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Acara Peradilan Pidana

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat benar atau salah berdasarkan hukum berlaku. Melalui analisa Undang-undang yang berhubungan dengan yang terjadi tentang *Hukum Acara Peradilan Pidana*

2. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan metode wawancara.

a. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dan juga membagikan kuesioner.

3. Teknis Analisa Data

Setelah data dikumpulkan maka diperiksa dan diteliti kembali, kemudian dianalisis secara mendalam untuk mencari kebenaran materiil yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti saat ini.

PEMBAHASAN

Mengenai tingkat pemahaman mahasiswa hukum terhadap berbagai sumber hukum acara pidana di Indonesia menjadi topik yang penting

dan relevan, karena berhubungan langsung dengan kualitas penegakan hukum dan pencapaian keadilan di masa mendatang. Hukum acara pidana sendiri merupakan cabang hukum yang mengatur prosedur dalam penerapan hukum pidana materiil, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan dan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum acara pidana sangat penting bagi mahasiswa hukum sebagai calon penegak hukum di masa depan.

Sumber-sumber hukum acara pidana di Indonesia meliputi beberapa peraturan utama, antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 24 ayat (1) yang mengatur kekuasaan kehakiman.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981 yang menjadi landasan utama dalam proses peradilan pidana.
- Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009).
- Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang mengatur teknis pelaksanaan KUHAP

Pemahaman mahasiswa terhadap sumber-sumber ini sangat menentukan kemampuan mereka dalam mengaplikasikan hukum acara pidana secara tepat dan jujur, yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana. Kebenaran materiil ini adalah kebenaran hakiki dan lengkap yang diperoleh melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah. Selain itu, pemahaman yang baik juga mencakup prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana, seperti prinsip legalitas, praduga tak bersalah, dan perlindungan hak asasi manusia selama proses peradilan. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi penting agar proses hukum berjalan adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama tersangka atau terdakwa yang harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, masih

ditemukan tantangan dalam penerapan hukum acara pidana, seperti kurangnya pemahaman yang komprehensif terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, serta penerapan prinsip *due process of law* yang belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pendidikan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana, agar mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam praktik penegakan hukum.

Manfaat pemahaman hukum acara pidana bagi mahasiswa hukum antara lain:

- Memudahkan mereka dalam memahami proses peradilan pidana secara menyeluruh.
- Membekali mereka dengan pengetahuan untuk melindungi hak-hak warga negara dalam proses hukum.
- Meningkatkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan alat bukti yang sah.
- Menjadi dasar yang kuat untuk berkontribusi dalam reformasi hukum dan penegakan keadilan di Indonesia

Dengan demikian, tingkat pemahaman mahasiswa hukum terhadap sumber-sumber hukum acara pidana sangat krusial untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan peran sebagai penegak hukum yang profesional, adil, dan berintegritas, serta mampu mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang transparan dan berkeadilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Mengenai tingkat pemahaman mahasiswa hukum terhadap sumber-sumber hukum acara pidana di Indonesia menunjukkan bahwa pemahaman tersebut sangat penting dan berperan krusial dalam membentuk kualitas penegakan hukum yang adil dan efektif. Mahasiswa hukum yang memahami sumber-sumber hukum acara pidana, seperti KUHAP, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan pelaksana lainnya, akan mampu mengaplikasikan aturan-aturan formil dalam proses peradilan pidana secara tepat dan objektif. Pemahaman ini juga mencakup pengenalan hak-hak tersangka atau terdakwa

serta prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana yang menjamin perlindungan hak asasi manusia selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, tingkat pemahaman yang baik memungkinkan mahasiswa untuk mengidentifikasi tahapan-tahapan proses pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan. Hal ini sangat penting agar mereka dapat berperan sebagai calon penegak hukum yang profesional dan berintegritas, serta mampu mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang transparan dan berkeadilan di Indonesia. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum agar pemahaman mahasiswa tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam praktik penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Husamuddin, DKK, 2024, *Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber*, Medan: PT media Indonesia
- Mohammad Masthuro, 2022, *Manfaat Memahami Hukum Acara Pidana untuk Masyarakat dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara* Jakarta, Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara.
- Murtia Dwi Sutrisna, 2023, *Criminal Procedure Code: Application "Due Process Of Law"*, JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-hukum-acara-pidana-lt6662ae6b13e26/>